

Rangkuman

Seminar Nasional

“Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan”



Pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 13.00–16.00 WIB, The Habibie Center (THC) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk, “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan.” Seminar ini bertujuan untuk menyosialisasikan peran Indonesia dan mengkaji prioritas dan tantangan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam memberikan berbagai alternatif solusi untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan regional. Seminar ini merupakan seri pertama dari rangkaian seminar yang akan dilaksanakan selama tiga kali pada 2023.

Seminar ini bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Total peserta yang hadir secara luring berjumlah 125 orang, sedangkan total peserta yang hadir secara daring melalui Zoom berjumlah 128 orang. Selain itu, sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, jumlah penayangan seminar yang dilakukan pada kanal Youtube THC dan KIS-API berjumlah 549.



Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Ketua AIPI. Pidato kunci disampaikan oleh H.E. Sidharto R. Suryodipuro, selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan pidato penutup disampaikan oleh Bapak Mohammad Hasan Ansori Ph.D., selaku Direktur Eksekutif THC.

Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A. (Anggota KIS-AIPI, Ketua Dewan Pengurus THC, dan Profesor Riset BRIN), H.E. Yuyun Wahyuningrum M.A. (Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)), Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D. (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan dimoderatori oleh Prof. Mayling Oey-Gardiner (Ketua KIS-AIPI).

Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro memulai pembukaannya dengan mengulas kembali penunjukan Presiden Joko Widodo sebagai ketua ASEAN di 2023 pada upacara penutupan KTT ke-40 di Kamboja. KTT tersebut meresmikan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, yang mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Berhubungan dengan tema tersebut, Dr. Satryo menekankan peran Indonesia dalam ASEAN selama ini selalu diiringi inovasi dan telah mempromosikan berbagai inisiatif signifikan untuk ASEAN. Namun demikian, ada berbagai isu regional yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Prof. Satryo menyebut krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, negosiasi *Code of Conduct* mengenai Laut Cina Selatan, serta rivalitas geopolitik di antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai tantangan dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Beliau juga menekankan peran penting Indonesia dalam mengatasi instabilitas di Myanmar. Selanjutnya, beliau menyampaikan harapannya agar seminar nasional ini dapat memberikan visualisasi terhadap peran Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, khususnya dengan berbagai isu yang akan dibahas. Terakhir, ia juga menyampaikan harapannya agar peserta berpartisipasi secara aktif dan turut membagi pendapat mereka.

Sebagai pemberi pidato kunci, H.E. Sidharto Suryodipuro menekankan bahwa seminar ini menjadi kesempatan untuk berdialog dan bersinergi di antara akademisi dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Beliau mengulas kembali konteks sejarah terbentuknya ASEAN dan bagaimana Indonesia selalu menawarkan jalan keluar yang strategis saat ASEAN berada di persimpangan jalan. Namun demikian, banyak tantangan eksternal serta internal yang akan dihadapi Indonesia dan ASEAN—baik krisis keuangan, perubahan iklim, krisis Myanmar, dan masih banyak lagi. Tema yang diangkat oleh Indonesia, yaitu ‘ASEAN Matters’, datang dari terbuktinya kepentingan tersebut pada dekade ke-6 sejak terdirinya ASEAN; ASEAN tidak hanya dibentuk oleh negara anggotanya, namun juga membentuk negara anggotanya. Selebihnya, ada tiga pilar yang dimiliki oleh tema tersebut; ‘ASEAN Matters’ menegaskan komitmen Indonesia agar menjadikan ASEAN tetap relevan dalam menyikapi dinamika global, ‘Epicentrum of growth’ mengingatkan bahwa ASEAN selalu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi—dimana Asia Tenggara telah menjadi titik terang dalam ekonomi global, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang mendorong

adanya kerjasama konkrit.

Bapak Sidharto menutup pidatonya dengan menegaskan peran semua pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan menciptakan kemakmuran kawasan. Anggota ASEAN harus mampu mempersiapkan visi besar jangka panjang hingga 2045, sebab tahun tersebut mencatat periode 100 tahun sejak kolonialisme di Asia berakhir. Dengan demikian, segala keberhasilan ataupun kegagalan akan seutuhnya menjadi tanggung jawab sendiri. Indonesia juga harus memastikan bahwa berbagai prioritas ASEAN dapat diutamakan dan menanggung harapan besar sebagai pemimpin ASEAN di tahun 2023.

Berlanjut ke sesi presentasi, narasumber pertama, Prof. Dewi Fortuna Anwar, mengangkat pertanyaan yang lahir dari tema ASEAN di 2023: “Mengapa ASEAN menjadi penting?” Beliau menekankan bahwa peran ASEAN menjadi sangat integral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, khususnya dalam menghindari konflik di Asia Tenggara. Kontribusi ASEAN terhadap perdamaian dan stabilitas tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara; yang pertama, adanya *Code of Conduct* (CoC) regional yang memastikan bahwa setiap kekerasan diselesaikan secara damai. Selanjutnya, ASEAN harus tetap menjadi badan yang mandiri. Terakhir, penerapan zona bebas nuklir bagi anggota ASEAN harus terus ditahankan. Selain itu, beliau membahas adanya ekspektasi tinggi yang datang dengan posisi ketua ASEAN, khususnya dengan berbagai pencapaian Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, seperti ketika menjadi tuan rumah G20.

Selain mengangkat pentingnya ASEAN dan peran Indonesia, Prof. Dewi menjelaskan berbagai tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Pertama, kebangkitan dan kebijakan RRT yang agresif di kawasan Laut Cina Selatan, Taiwan, Laut Cina Timur, dan Indo-Pasifik meningkatkan ketidaknyamanan. Di atas itu, meningkatnya ketegangan dan rivalitas di antara Amerika Serikat dan RRT serta munculnya minilateralisme dalam membendung RRT harus turut diperhatikan. Selain tantangan eksternal, terdapat pula tantangan internal—yakni krisis Myanmar, perbedaan ekonomi dan sosial budaya di antara anggota ASEAN, serta keterbatasan ASEAN sebagai institusi. Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi, tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas untuk ditangani. Prioritas eksternal mencakup penyelesaian *Code of Conduct* Laut Cina Selatan yang konsisten dengan Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS), penguatan arsitektur kawasan yang inklusif dan dimotori oleh ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN, serta implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang jelas dan relevan terhadap mitra dialog di Indo-Pasifik. Sedangkan prioritas internal yang dapat turut diperhatikan adalah keaktifan dalam membantu mengatasi krisis politik di Myanmar. Prof. Dewi menekankan bahwa posisi Myanmar dalam ASEAN turut diperhatikan dan menyarankan adanya sanksi bagi Myanmar atas pelanggaran nilai-nilai ASEAN. Selain itu, penyelesaian konflik tersebut membutuhkan peta jalan berjangka panjang.

Sebagai penutupan sesi presentasinya, Prof. Dewi membahas pentingnya mengulas piagam ASEAN, memperkuat solusi terhadap krisis institusi ASEAN, dan peningkatan peran ASEAN di tingkat global.

Selanjutnya, narasumber kedua, H.E. Yuyun Wahyuningrum, M.A., mendalami lebih lanjut mengenai evaluasi perkembangan konflik di Myanmar serta peran Indonesia dalam upaya menyelesaikannya. Ibu Yuyun memulai dengan penjelasan mengenai Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati pada April 2021. Konsensus tersebut termasuk penghentian segala bentuk kekerasan di Myanmar, dialog antar pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, serta kunjungan utusan khusus oleh ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar. Ibu Yuyun juga menyinggung pencapaian-pencapaian penting yang telah diraih oleh ASEAN dalam mengatasi krisis tersebut selama tahun 2021-2023. Sedangkan, hingga Februari 2023, berikut adalah perkembangan konflik yang tercatat; hampir setengah dari populasi Myanmar hidup dalam kemiskinan, 1,5 juta orang telah melarikan diri, 671 insiden kekerasan terhadap perawatan kesehatan (Laporan OCHA), 2.954 orang dibunuh, 17.668 orang telah ditangkap, dan 13.829 orang masih dalam tahanan (Laporan AAPP). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa situasi di Myanmar tetap rapuh dan diiringi krisis, sehingga turut memengaruhi pembangunan ASEAN.

Selebihnya, AICHR memiliki peran yang penting dalam merespon krisis Myanmar. Pada rapat ASEAN ke-33, AICHR mengekspresikan minatnya untuk membantu Myanmar dengan kegiatan apapun yang dapat ditugaskan oleh ASEAN Foreign Ministers. Pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat, dan pengajuan dari AICHR Indonesia untuk penerapan 5PC yang lebih berbasis pendekatan HAM.

Terakhir, Ibu Yuyun memaparkan arah kebijakan dan peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis tersebut: bantuan kemanusiaan menjadi prioritas, rencana implementasi 5PC harus terus diperbaiki, dan usulan Presiden Joko Widodo dalam mengirim perwira tinggi RI untuk bertemu junta dalam *General-to-general Talk* perlu dimatangkan. Dialog terbuka dengan semua pihak di Myanmar juga sangat penting dalam membangun solusi yang efektif dan dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai mekanisme dan instrumen di bawah ASEAN.

Pada sesi terakhir, Prof. Hikmahanto Juwana mengangkat isu ‘Perkembangan Negosiasi Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan (LCS) dan Arah Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa LCS’. CoC sendiri merupakan ketentuan terkait perilaku negara-negara di LCS, serta cara membangun kerjasama di LCS. CoC juga bertujuan untuk menghindari insiden antar negara di LCS, ataupun menyelesaikannya secara damai. Terakhir, CoC memastikan keamanan laut dan kebebasan berlayar di LCS.

Declaration of Conduct (DoC) telah disepakati oleh anggota ASEAN dan RRT sejak tahun 2002. Namun demikian, CoC masih belum disepakati hingga saat ini dan semua negara terlibat sedang dalam tahap ‘*first reading*’. Menurut Prof. Hikmahanto, melanjutkan negosiasi CoC setelah 2 tahun pandemi menjadi tantangan. Terlebih, terdapat perdebatan terkait pengikatan hukum CoC, jangkauan wilayah perairan yang diberlakukan, dan negara mana saja yang harus mematuhi CoC. Selain itu, suasana sekarang sedang tidak kondusif untuk bernegosiasi; RTT bersikap secara agresif dari waktu ke waktu—diantaranya, ada keinginan untuk menguasai sumber daya alam di

nine-dash line, dan mampu mengerahkan kekuatan militernya. Selain itu, geopolitik AS dan RTT semakin tegang, dan terdapat pula pertentangan di antara anggota ASEAN.

Sebagai penutupan sesi presentasinya, Prof. Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim *nine-dash line* serta harus memastikan bahwa konflik bersenjata tidak terjadi di LCS dan wilayah ASEAN. Keketuaan Indonesia di ASEAN menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia untuk terus mengupayakan kesepakatan CoC. Terakhir, Indonesia memiliki peran penting sebagai perantara perdamaian yang jujur bagi negara-negara yang berkonflik di LCS dan harus mengedepankan dialog yang inklusif.

Sesi presentasi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat sepuluh orang peserta seminar yang menyampaikan pertanyaan dan komentar terkait dengan perkembangan situasi Myanmar, konflik di Laut China Selatan, tantangan dan kesempatan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN, serta penegakan HAM baik itu di Indonesia dan ASEAN.

Acara seminar ini ditutup dengan sambutan penutup dari Dr. Mohammad Hasan Ansori selaku Direktur Eksekutif THC. Sebagai organisasi masyarakat yang mengedepankan nilai nilai demokrasi dan promosi HAM, THC mendorong penyelesaian berbagai persoalan politik dan keamanan di ASEAN dalam kerangka dan mekanisme yang mengedepankan demokrasi dan nilai-nilai HAM. The Habibie Center berkomitmen untuk terus mengiringi Indonesia dalam memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi organisasi yang penting untuk masyarakat ASEAN.

Terakhir, Dr. Mohammad Hasan Ansori berharap agar seminar ini membawa ide ide dan visi yang nantinya akan membantu Indonesia menciptakan berbagai kesempatan dan mengeksplorasi apa yang ASEAN dapat lakukan di bawah keketuaan Indonesia tahun ini.